

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia

 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia,2002).

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Panorama, Maya dan Muhajirin. 2017. *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press

Radjab, Enny dan Andi Jam'an. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar

Yuniningsih, Tri. 2019. *Kajian Birokrasi*. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press

Wibowo, Eddi & Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society*, Yogyakarta: YPAPI.

Jurnal

Ahmad Yamin. 2021. Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2

Fitriyani Yuliawati, Subhan Agung, Sangketa Aset Pasca Pemekaran Wilayah Kota dan kabupaten Tasikmalaya, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, vol 1 no 2, januari 2013, hl 152.

Indra Hermawan, Tjahya Supriatna, Ali Hanafiah Muhi.2021. *Konflik Aset Daerah Antara Pemerintah Daerah Pasca-Pemekaran Studi Kasus Konflik Kepemilikan Bangunan Antara Pemerintah kabupaten Kerinci kepada pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.**Jurnal Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Vol. 13, No 1

Muhammad Ichsan Kabullah, Hendri Koeswara, Didi Rahmadi .2021. Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, Vol. V Nomor 2

Tummers, L. 2012. *Policy Alienation: Analyzing the Experiences of Public*

Professionals with New Policies. Rotterdam: Ph.D Thesis Erasmus University Rotterdam.

Tummers, L. G., Bekkers, V. J. J. M., & Steijn, A. J. 2009. *Policy alienation of public professionals: Application in a new public management context*. *Public Management Review*, 11(5), 685-706.

Skripsi/Thesis

Ahmad Rizki Sadali. (2013). *Dampak Pemekaran Dan Konflik Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Dan Sengketa Aset Pasca pemekaran Periode 2001-2013)*. Depok: Universitas Indonesia.

Candra, Eka Putra, Wardi, Heldi. 2021. *Analisis Masalah dan Kendala Dalam Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci Ke Kota Sungai Penuh*. Tesis Pascasarjana Magister Teknik Sipil Universitas Bung Hatta Padang.

Nanda Aris, *Alienasi Politik Masyarakat Kota Padang Pada Pilkada Putaran II Tahun 2014*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

Nurlidiana. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rizky Muhammad. 2014. *Konflik Penyerahan Aset Daerah Pemekaran Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional di Tangerang Selatan*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rahendra Muhazir. 2022. *kajian insentif dan disinsentif pemanfaatan tata ruang untuk mendukung penggunaan angkutan public di kota payakumbuh*. Tesis Pascasarjana Magister Teknik Sipil Universitas Andalas Padang.

Romanza Rafi. 2020. *Implementasi kebijakan penyerahan asset dari pemerintah kabupaten Kerinci kepada pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*. Skripsi Ipdn program Studi Politik Pemerintahan.

R. Ali Aulia. 1999. *Bentuk-Bentuk Partisipasi dan Alienasi Politik Mahasiswa*. Skripsi. Jakarta FISIP Universitas Indonesia.

Tanjung Riki. 2022. *Akuntabilitas Pemerintahan Nagari Manggopoh Dalam Pelaksanaan Brogram Bantuan Sosial Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19*. Skripsi jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Andalas Padang.

Mareta Dias Ayu Lupita Sari. 2017. *Penyerahan asset tetap daerah dari kabupaten Serang kepada Kota Serang Provinsi Banten*. Skripsi jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Sumber dari berita/Internet

<https://www.metrojambi.com/read/2021/06/18/64016/pemkab-kerinci-resmiserahkan-aset-ke-pemkot-sungaipenuh>, diakses pada tanggal 26 juli 2022

<https://jambiekspres.co.id/read/2021/06/18/45740/hari-ini-sejumlah-aset-kerinciresmi-diserahkan-ke-sungai-penuh> diakses pada tanggal 26 juli 2022

<https://sungaipenuhkota.go.id/beranda/penyerahan-aset-dari-pemkab-kerinci-kepemkot-sungai-penuh-tuntas/>, diakses pada tanggal 28 juli 2022

<https://www.medialintassumatera.com/2021/06/terbengkalai-puluhan-tahun-penyerahan.html> diakses pada tanggal 28 juli 2022

<https://kbbi.lektur.id/penyerahan> diakses pada tanggal 28 juli 2022

<https://www.metrojambi.com/read/2022/01/24/68573/puluhan-honorersud-mha-thalib-sungaipenuh-dirumahkan-termasuk-sejumlah-dokter> diakses pda tanggal 1 Desember 2022

<https://jambi.tribunnews.com/2019/11/07/persoalan-aset-jadi-topik-hut-ke-11-kota-sungai-penuh-fajran-kami-sudah-risau> diakses pada tanggal 28 Desember 2022

<https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/ketua-dprd-fajran-nilai-pemkab-kerinci-kurang-serius-menyelesaikan-penyerahan-aset/> diakses pada tanggal 28 Desember 2022

<https://imcnews.id/read/2022/01/25/17831/imbaspemkab-kerinci-69-honorersud-mha-thalib-dirumahkan>

<https://www.metrojambi.com/peristiwa/13538453/Pembangunan-Kantor-Bupati-Kerinci-Ditargetkan-Selesai-Akhir-2020>:

Dokumen

Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Peraturan daerah Kabupaten Kerinci No 15 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan Menteri luar negerid nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru di bentuk.

Dokumen inventarisasi aset Kab.Kerinci yang diserahkan ke Kota Sungai Penuh.

